



UNIVERSITAS WIRARAJA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : lppm@wiraraja.ac.id Website : lppm.wiraraja.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 271/SP.HCP/LPPM/UNIJA/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Anik Anekawati, M.Si
Jabatan : Kepala LPPM
Instansi : Universitas Wiraraja

Menyatakan bahwa :

1. Nama : Nur Inna Alfiyah, S.IP., M.Hub.Int.
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
2. Nama : Ida Syafriyani, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Telah melakukan cek plagiarisme ke LPPM menggunakan *software turnitin.com* untuk artikel dengan judul **"EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN DALAM MENINGKATKAN KESEJATERAAN MASYARAKAT KECAMATAN SARONGGI KABUPATEN SUMENEP"** dan mendapatkan hasil similarity sebesar 24%

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya.

Sumenep, 20 September 2022

Kepala LPPM,

Dr. Anik Anekawati, M.Si.

NIDN. 0714077402

EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN SARONGGI KABUPATEN SUMENEP

by Nur Inna Alfiyah

Submission date: 19-Sep-2022 04:14PM (UTC+0700)

Submission ID: 1903440028

File name: 0727039101-1743-Artikel-Plagiasi-15-09-2022.pdf (317.32K)

Word count: 5047

Character count: 33398

EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN SARONGGI KABUPATEN SUMENEP

Nur Inna Alfiyah¹, Ida Syafriyani²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Wiraraja

Email: nurinna@wiraraja.ac.id¹, idadfisipunjia@gmail.com²

18

ABSTRACT

This study aims to measure the effectiveness of the Minapolitan area in improving community welfare. Until now poverty is a never ending problem to be examined, various policy formulas have been issued to reduce and alleviate poverty. One of them is the Minapolitan program which aims to develop a more productive economic area, so that people are able to be independent. Sumenep as one of the areas selected for the development of the Minapolitan area, with the existence of the Minapolitan program, provides benefits for the government in an effort to reduce poverty levels in Sumenep, especially in coastal areas where most of the people depend on marine products. The research method uses a qualitative method with a descriptive approach. The results showed that the Minapolitan program, especially in Saronggi District, was able to provide changes for the community, especially for fish and seaweed cultivators, these changes can be seen from the results of production which have an impact on the economic independence of the community.

Keyword: Poverty, effectiveness, Minapolitan

PENDAHULUAN

Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan jumlah pulau pada tahun 2018 dalam buku statistik Indonesia berjumlah 16.056 pulau. Banyaknya pulau tersebut membuat Indonesia di kelilingi oleh lautan, dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia (± 81.000 km) menjadikan Indonesia sebagai negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Kekuatan ini memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian Indonesia ke depan (<http://www.perumperindo.co.id>, di akses 12-02-2020). Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang tentu wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki banyak keaneka ragaman sumber daya baik dari sektor perikanan, terumbu karang hingga minyak bumi dan gas. Banyaknya sumber daya tersebut jika dimanfaatkan tentu akan memberikan

keuntungan bagi Indonesia sendiri terutama dalam memberikan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Perikanan di Indonesia diperkirakan berpotensi sebesar 6,5 juta ton/tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton/tahun atau $\pm 80\%$ dari potensi lestari.

Berdasarkan JTB tersebut yang baru dimanfaatkan hanya sebesar 4 juta ton (pada tahun 2002 atau baru 78,13%). Peluang pasar hasil perikanan dapat dibagi menjadi pasar domestik dan luar negeri. Pasar domestik di Indonesia ± 220 juta penduduk dan konsumsi protein per kapita ± 22 kg/kapita/tahun. Sedangkan peluang pasar ekspor antara lain ke Jepang (40%), USA (15%), Eropa (20%), RRC (10%), Hongkong (5%), Singapura (5%) dan negara lainnya (5%). Badan Pusat Statistik mencatat, subsektor perikanan mempunyai

peluang berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari tahun 2015 sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 1,41% terhadap PDB Indonesia dengan laju pertumbuhan pertahunnya yaitu sebesar 15,79% di atas PDB Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan angka pertumbuhan di Tahun 2017 yang mencapai Rp. 227,3 triliun dengan pertumbuhan sebesar 5,95% atau naik 15,33% dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,15% (<http://kkp.go.id>).

Potensi yang dimiliki dalam sektor perikanan tidak hanya sebatas pada besarnya SDA saja, potensi lain yang dimiliki dan perlu untuk terus dikembangkan dan disejahterakan ialah sumber daya manusianya terutama yang hidup di daerah pesisir yang masih perlu untuk disejahterakan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir tidak menikmati kesejahteraan dan kemakmuran karena menghadapi berbagai masalah yang menyebabkan kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, kemiskinan di Indonesia mencapai 26,58 juta, di antaranya 61,36% tinggal di daerah pesisir dan pedesaan (BPS. 2018. Diakses di

<https://www.bps.go.id>).

Kemiskinan merupakan problem besar pemerintah, yang sampai saat ini masih belum ada solusi paten dalam upaya pengetasan kemiskinan tersebut. Segala formula dan cara pengentasan kemiskinan telah diluncurkan baik oleh organisasi-organisasi internasional hingga upaya dari pemerintah negara sendiri dalam mengeluarkan berbagai kebijakan. Di Indonesia, upaya pengentasan kemiskinan dikeluarkan dalam berbagai bentuk kebijakan dengan program-program yang ada. Oleh karena itu untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi di daerah pesisir maka dibutuhkan kebijakan pemerintah sebagai salah satu solusi dalam menghadapi kemiskinan tersebut. Salah satu bentuk kebijakan dalam upaya mengurangi kemiskinan di daerah pesisir adalah munculnya program minapolitan yang dicetuskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

89 | Nur Inna Alfiah, Ida Syafriyani | Efektivitas....

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia sebagai wadah dalam menangani kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan tentu ini menjadi salah satu tugas penting bagi kementerian untuk merealisasikan kesejahteraan tersebut. Dimana melalui misinya KKP telah menetapkan beberapa strategi yang menjadi acuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara umum, antara lain; *pertama*, memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia yang terintegrasi. *Kedua*, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. *Ketiga*, meningkatkan produktivitas dan daya saing basis pengetahuan. *Keempat*, memperluas akses ke pasar domestik dan internasional (Bank Indonesia.2015). Berdasar pada misi dari KKP, tentu dalam upaya mewujudkan misi tersebut membutuhkan program yang mampu merepresentasikan tujuan-tujuan dalam upaya mengurangi kemiskinan bagi daerah pesisir. Salah satu langkah yang diambil oleh KKP adalah dengan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan. Minapolitan sendiri merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan (<http://perpustakaan.bappenas.go.id>).

Untuk menerapkan kebijakan tersebut dibutuhkan strategi pengembangan keterkaitan antar kawasan yang meliputi tata kelola ekonomi daerah, kualitas/ kompetensi SDM, infrastruktur, *public private partnership*, serta fasilitasi pengembangan ekonomi lokal daerah. Hal ini diperlukan sebagai syarat untuk fokus pada lokasi pengembangan kawasan andalan, pusat-pusat pertumbuhan wilayah seperti kawasan industri berbasis kompetensi inti industri daerah berbentuk kluster kawasan sentra produksi, kawasan perkotaan baru, pengembangan kawasan agropolitan maupun kawasan Minapolitan. Kawasan-kawasan tersebut diharapkan dapat memicu peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan PAD melalui pengembangan produk unggulan dengan disertai jaminan pas. Pada tahun 2011, KKP menetapkan sedikitnya 45 kabupaten/kota dari 33 provinsi sebagai daerah pengembangan kawasan minapolitan (<https://regional.kompas.com>).

Kabupaten Sumenep sebagai wilayah yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, mejadikan Sumenep sebagai salah satu wilayah sasaran dalam program minapolitan. Terlebih lagi Sumenep memiliki desa perikanan yang berjumlah 170 desa dengan jumlah nelayan dan petani ikan sebanyak 41.810 nelayan (BPS Kab.Sumenep 2018, <https://sumenepkab.bps.go.id>). Banyaknya jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan petani ikan menjadi perhatian pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sehingga diperlukan adanya formula untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut, terlebih lagi kondisi kemiskinan di wilayah Sumenep yang masih terbilang cukup tinggi. Peningkatan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh perubahan garis kemiskinan, yaitu tingkat pendapatan rata-rata orang saat ini sebesar 340 ribu 33 rupiah perkapita perbulan (Rukayah, <http://rri.co.id>). Untuk wilayah pesisir di Kabupaten Sumenep, masyarakat hanya bergantung terhadap tinggi dan rendahnya gelombang yang menjadikan pendapatan mereka tidak menentu. Sehingga pemerintah daerah melalui Dina Perikanan dengan kerjasama bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pengembangan kawasan ekonomi berbasis perikanan budidaya terintegrasi (minapolitan). Program minapolitan sendiri di dalam pemerintah daerah khususnya dinas perikanan masuk dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep tahun 2013-2033 yaitu sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata, dan industri, sehingga mampu mendorong kemandirian dan daya saing

daerah tanpa melupakan perlindungan dan kelestarian sumber daya alam (Renstra 2018, <http://dataprimer.sumenepkab.go.id>).

Pengembangan kawasan minapolitan sendiri di Sumenep sudah dimulai pada tahun 2010 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.32/Men/2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan dengan tiga kecamatan yang menjadi wilayah pengembangan minapolitan yaitu Kecamatan Saronggi, Kecamatan Bluto, Kecamatan Pasongsongan. Pemilihan tiga kecamatan tersebut didasarkan letak wilayah yang berdekatan dengan laut, diantara tiga wilayah minapolitan tersebut Kecamatan Saronggi menjadi pusat pengembangan minapolitan yang dilihat dari porsi pendapatan masyarakat yang sebagian masih bergantung terhadap pendapatan laut yang tidak menentu. Sehingga dengan adanya latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana efektivitas pengembangan kawasan minapolitan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Kecamatan Saronggi, Sumenep. Urgensi penelitian ini terletak pada bagaimana efektivitas pengembangan kawasan minapolitan yang berjalan di Kecamatan Saronggi nantinya menjadi percontohan bagi wilayah pesisir lain di Sumenep. Sehingga nantinya akan membentuk masyarakat yang mandiri dalam mengelola perkonomian mereka. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah terkait bagaimanakah Efektivitas Pengembangan Kawasan Minapolitan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengembangan kawasan minapolitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Saronggi Kab.Sumenep, dengan melihat bagaimana Pemahaman Program dilakukan, Sasaran program, pelaksanaan program yang Tepat Waktu hingga tercapainya Tujuan Program serta Perubahan Nyata dari

implementasi program minapolitan bagi masyarakat Kec. Saronggi.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas dan Indikator Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya berkaitan dengan kebijakan publik, dimana untuk mengukur sukses atau tidaknya kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah maka dibutuhkan kajian atau pembahasan terkait efektifitas dari kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti yang diutarakan oleh Gitosudarmo dalam Sutrisno (2016 : 145) mengatakan bahwa efektifitas dapat didefinisikan sebagai tingkat atau derajat pencapaian hasil yang diharapkan. Semakin besar hasil yang dicapai, berarti menjadi semakin efektif. Selanjutnya Akmal dalam Priansa (2015:11) juga menjelaskan bahwa efektifitas adalah tercapainya suatu kesepakatan sesuai dengan rencana (doing the right things) atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil.

Menurut Steer dalam Sutrisno (2016:89) berpendapat bahwa Efektivitas umumnya dikaitkan dengan tujuan organisasi, atau keuntungan, dan cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan proses, yaitu sumber dayam manusia. Menurutnya bahwa yang terbaik dalam meneliti efektifitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan: (1) optimalisasi tujuan-tujuan; (2) prespektif sistem; dan (3) tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Upaya untuk mengukur efektifitas sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan kriteria lainnya yaitu rasionalitas dan efisiensi. Ketiga kriteria tersebut merupakan entitas pelengkap yang berhubungan dengan keberhasilan serangkaian aktivitas manusia yang beragam dalam suatu organisasi, baik yang berkaitan dengan pemerintah maupun bisnis. Dari segi kriteria efektifitas, unsur-unsurnya antara lain (Makmur,2015:7-8); 1) Ketepatan waktu, waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan

yang dilakukan dalam sebuah organisasi. 2) Ketepatan perhitungan biaya, dalam unsur ini ditekankan pada ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan. 3) Ketepatan dalam pengukuran, setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa mempunyai ukuran keberhasilan tertentu. 4) Ketepatan dalam menentukan pilihan. 5) Ketepatan berpikir, dalam unsur ini ketepatan berpikir akan melahirkan keefektivan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal. 6) Ketepatan dalam melakukan perintah. 7) Ketepatan dalam menentukan tujuan, sehingga tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektifitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang. 8) Ketepatan-ketepatan sasaran. Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan secara organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.

Menurut Sutrisno (2016: 125-126) dalam mengukur efektifitas terdapat 5 indikator yaitu; a) Pemahaman Program, b) Tepat Sasaran, c) Tepat Waktu, d) Tercapainya Tujuan, e) Perubahan Nyata. Sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2014:77), apakah kriteria atau tindakan untuk mencapai suatu tujuan itu efektif, yaitu: 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. 2) kejelasan strategi pencapaian tujuan; Strategi ini dikenal sebagai 'pekerjaan dalam proses'. Berbagai upaya kemudian dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini membuat pelaksana tidak terjebak dalam mencapai tujuan mereka. Tujuan organisasi hilang 3) Proses menganalisis dan mengembangkan kebijakan yang sehat dalam kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang ditetapkan harus memastikan bahwa kebijakan mampu menghubungkan tujuan dengan upaya untuk melaksanakan kegiatan operasional. 4) Perencanaan yang cermat pada dasarnya berarti memutuskan sekarang apa yang akan

dilakukan organisasi di masa depan. 5) Program yang tepat, persiapan perencanaan yang baik harus dijabarkan dalam program implementasi yang tepat. 6) ketersediaan sarana dan prasarana kerja; Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuannya untuk bekerja secara produktif. Tersedia sarana dan prasarana yang dapat disediakan oleh organisasi Anda. 7) Implementasi yang Efektif dan Efisien. Sebaik apapun suatu program, tidak akan tercapai tujuannya jika tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien. Karena pelaksanaan organisasi lebih dekat dengan tujuan. 8) Sistem pengawasan dan manajemen pendidikan yang humanistik belum sempurna. Efektivitas suatu organisasi memerlukan adanya sistem pengawasan dan manajemen.

Kemiskinan

Kemiskinan muncul dari ketimpangan akses permodalan. Hal ini sering membuat orang takut ketika ingin berwirausaha, yaitu ada sekelompok orang yang memiliki modal terbatas tetapi memiliki akses ke sumber-sumber modal yang ada. Menurut Todaro (2012:80) kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya; a) Kemiskinan skala makro muncul dari pola kepemilikan sumber daya yang tidak setara. Adanya kelompok masyarakat yang memonopoli kepemilikan sumber daya dapat menyebabkan munculnya kemiskinan. b) Kemiskinan timbul dari perbedaan kualitas sumber daya manusia. Ternyata orang miskin tidak bisa keluar karena tidak memiliki pengetahuan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki orang kaya.

Pengembangan Kawasan Minapolitan

Menurut Rustiadi, dkk (2011:150) pengembangan kawasan atau wilayah dapat dilihat sebagai bentuk intervensi aktif dalam pembangunan daerah dan memerlukan strategi yang efektif untuk mempercepat pembangunan. Pengembangan kawasan atau wilayah bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pemerataan kesempatan pertumbuhan

ekonomi antar daerah. (2) Meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat antar daerah. (3) memperkuat struktur perekonomian nasional dan daerah. Rencana pembangunan daerah atau regional perlu dilaksanakan dalam keterkaitan antar sektor dan antar daerah, dan pembangunan negara ke daerah, yang ditunjukkan dengan tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. meningkatkan perkembangan Keseluruhan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan secara keseluruhan (Adisasmita, 2015:3). Sedangkan Minapolitan adalah kota atau kawasan perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani dan mendorong kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya, dengan ciri utama kegiatan perikanan dan pengolahan hasil perikanan. (Sekj KKP, 2013:10)

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan, disebutkan bahwa minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip – prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan. Minapolitan bertujuan untuk: (a) meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat skala mikro dan kecil, (b) meningkatkan jumlah dan kualitas usaha skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi, dan (c) meningkatkan sektor kelautan

dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional (Sekjen KKP, 2013:16).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif dengan penjelasan kualitatif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Sumenep, khususnya di Kecamatan Saronggi sebagai salah satu daerah penerima program minapolitan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan survey langsung ke lapangan. Sedangkan data sekunder di dapat melalui data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah bersifat diskriptif naratif. Fokus kajian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada lima indikator efektivitas menurut Sutrisno (2016: 125-126) yaitu; a) Pemahaman Program, b) Tepat Sasaran, c) Tepat Waktu, d) Tercapainya Tujuan, e) Perubahan Nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Program Minapolitan

Secara definitif Minapolitan adalah kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani dan mendorong kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya, dengan ciri utama kegiatan perikanan dan pengolahan hasil perikanan (Sekjen KKP, 2013:10). Kemudian menurut Sekjen KKP (2013:16) Minapolitan bertujuan untuk: (a) meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat skala mikro dan kecil, (b) meningkatkan jumlah dan kualitas usaha skala menengah ke atas untuk meningkatkan daya saing, dan (c) memperkuat sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional. Program Minapolitan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menciptakan *blue economy* yang berarti pemanfaatan dan pengembangan wilayah-wilayah kelautan dan

pesisir yang memiliki nilai ekonomis sehingga tingkat perekonomian di wilayah-wilayah tersebut dapat terangkat atau menyerupai kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan.

Kabupaten Sumenep memulai program Minapolitan dari tahun 2017. Desa Tanjung Kecamatan Saronggi merupakan salah satu desa di Kabupaten Sumenep yang telah menerapkan program Minapolitan. Sebelum dilaksanakan program Minapolitan di Desa Tanjung, Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep terlebih dahulu melakukan sosialisasi tentang Program Minapolitan. Dinas Perikanan sendiri dalam upaya mensosialisasikan program minapolitan tidak serta merta selalu menggunakan cara yang formal, terkadang inovasi mereka dalam mengupayakan agar sosialisasi berhasil dan para Pokdakan memahami harus menggunakan cara-cara tersendiri dalam penyampaianya.

Meskipun dalam penyampaianya para anggota Pokdakan kurang bisa menjelaskan tahapan-tahapannya, namun minimal mereka sudah paham akan tahapan-tahapan tersebut sehingga bisa dikatakan Dinas Perikanan mampu membuat para Pokdakan memahami yang harus mereka lakukan agar produksi mereka dapat terus meningkat sesuai sasaran. Hal ini sesuai dengan salah satu indikator efektivitas indikator yaitu terkait dengan pemahaman program menurut Sutrisno (2016:125-126) bahwa suatu program atau kebijakan akan berjalan efektif jika para pelaku program atau kebijakan tersebut dapat memahami program yang akan dijalankan.

Pihak warga atau pembudidaya yang kurang paham atau tidak mengerti pasti akan merasa tidak cocok dengan apa yang sudah disosialisasikan, hal ini dikarenakan pada saat sosialisasi beberapa pembudidaya tidak mengikutinya dikarenakan harus bekerja di laut ataupun urusan lainnya. Namun, mereka tetap optimis bahwa meskipun mereka tidak paham atau kurang mengerti, hal tersebut tidak mengganggu hasil produksi mereka.

Selanjutnya dalam mewujudkan pengembangan ekonomi masyarakat lokal/perdesaan melalui konsep minapolitan

dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sebagai unsur pendukung terhadap terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Adapun sarana prasarana yang dibutuhkan dan diberikan oleh pemerintah dalam klaster rumput laut ini berupa paket bantuan bibit rumput laut model rakit dan paket bantuan bibit rumput laut model longline. Paket bantuan bibit rumput laut model rakit terdiri dari sarana utama yaitu bibit starter rumput laut (kultur jaringan) sebanyak 200 kg dan peralatan yaitu tali ris no.5 12 kg, tali ikat no.2DN sepanjang 500m, bambu sebanyak 9 batang, serta jangkar

sebanyak 2 buah. Kemudian untuk paket bantuan bibit rumput laut model longline terdiri dari sarana utama yaitu bibit starter rumput laut (kultur jaringan) sebanyak 200 kg, dan peralatan yaitu tali ris no. 5PE 9 kg, tali ikat No. 1,5 PE sepanjang 750 m, serta tali utama / As No. 12 PE 22 kg..

Tabel.1
Paket Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut Model Rakit

No.	Bahan	Volume
A	Sarana Utama	
1	Bibit Starter Rumput Laut (Kultur Jaringan)	200 Kg
B	Peralatan	
1	Tali Ris No. 5	12 Kg
3	Tali Ikat No. 2 DN	500 m
4	Bambu	9 Batang
5	Jangkar	2 Buah

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep Tahun 2019

Tabel.2
Paket Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut Model Longline

No	Bahan	Volume
A	Sarana Utama	
1	Bibit Starter Rumput Laut (Kultur Jaringan)	200 Kg
B	Peralatan	
1	Tali Ris No. 5 PE	9 Kg
3	Tali Ikat No. 1,5 PE	750 m
4	Tali Utama / As No. 12 PE	22 Kg

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep Tahun 2019

Sarana prasarana yang diberikan oleh pemerintah tersebut dalam pemenuhan kebutuhan kegiatan masih dirasa kurang terutama dalam hal anggaran, oleh karena itu efisiensi harus selalu ditekankan dalam pengelolaan anggaran sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah dalam penyediaan kebutuhan sarana prasarana merupakan hal yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu program. Hal tersebut dapat menjadi penyebab tidak tercapainya target dan tujuan yang diinginkan.

Tepat Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan unsur penentu berhasil tidaknya suatu program atau kebijakan yang dijalankan. Suatu program dapat dikatakan berhasil apabila sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berjalan selaras dan menghasilkan output yang diinginkan. Menurut Makmur (2015:7-8), penentuan sasaran yang tepat dan baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan secara organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Sasaran utama yang menjadi tujuan Dinas Perikanan Kabupaten lebih banyak berfokus dalam masalah hasil produksi, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan ekonomi perikanan. Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pembahasan penentuan tujuan, sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional.

Beberapa faktor seperti cuaca yang tak menentu, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta kualitas sumber daya manusia yang kurang, turut mempengaruhi terhadap hasil produksi dan capaian target atau sasaran yang telah ditentukan. Kondisi alam merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan hasil dan kualitas produksi.

Setiap program mempunyai indikator-indikator tertentu dalam mengukur sejauh mana tingkat keberhasilannya. Indikator yang dipakai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep sendiri

dalam mengukur tingkat keberhasilan program minapolitan adalah melalui hasil produksi, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan ekonomi perikanan.

Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir sebagai tujuan utama program minapolitan berjalan selaras dengan visi misi Kabupaten Sumenep. Sehingga kedepannya hal tersebut dapat memberikan dampak yang besar baik terhadap masyarakat maupun Dinas Perikanan selaku OPD terkait merencanakan kebijakan mengenai Minapolitan dengan melihat kebutuhan-kebutuhan dari daerah Desa Tanjung itu sendiri dan masalah perekonomian dan peningkatan hasil produksi merupakan hal mendasar yang menjadi tolak ukur untuk pengambilan suatu kebijakan. Program minapolitan sebagai *blue economy* harus mampu menciptakan *multiplier effect* bagi daerah atau masyarakat sekitarnya. Peningkatan kegiatan perekonomian sebagai adanya dampak dari program minapolitan akan secara otomatis berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakatnya.

Kebiasaan warga dalam kehidupan sehari-hari yaitu saling bergotong royong dan saling mendukung satu sama lain dalam hal pembudidayaan merupakan faktor pendukung keberhasilan program karena dengan pola pikir seperti itu akan membuat warga semakin mandiri dalam mengelola usaha mereka. Keadaan ekonomi penerima program minapolitan ikut terbantu meskipun tidak terlalu signifikan. Musyawarah dan saling membantu satu sama lain menjadi solusi bersama dalam menutupi kekurangan-kekurangan yang ada.

Tepat Waktu

Rentang waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan minapolitan adalah satu tahun dan selebihnya tergabung ke dalam kelompok budidaya ikan atau Pokdakan. Menurut Makmur (2015:7-8), waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam

sebuah organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Namun mulai dari tahun 2016, kewenangan di bidang kelautan yang diambil oleh pemerintah provinsi menjadi hambatan serius bagi Dinas Perikanan, karena mereka saat ini sudah tidak lagi memiliki kewenangan mereka di bidang kelautan. Hal ini membuat mereka hanya bisa sebatas membantu dalam hal monitoring, evaluasi dan pelaporan saja sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan inovasi-inovasi dikarenakan semuanya diambil alih dan sudah diatur oleh pihak pemerintah provinsi.

Program minapolitan di Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep pernah menjadi wilayah percontohan dalam kawasan minapolitan selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2011. Program Minapolitan di Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep berlandaskan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang minapolitan yang kemudian pada tahun 2011 telah ditetapkan 24 (dua puluh empat) lokasi sentra produksi perikanan budidaya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP.70/DJ-PB/2010 Tentang Penetapan 24 Lokasi Sentra Produksi Perikanan Budidaya sebagai Percontohan Tahun 2011 Kabupaten Sumenep termasuk ke dalam lokasi sentra perikanan budidaya di bidang klaster rumput laut.

Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2012 keberhasilan Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep dalam pengelolaan bidang perikanan dan kelautan dibuktikan dengan masuknya Kabupaten Sumenep menjadi wilayah percontohan dalam Kawasan Minapolitan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP. 123/DJ-PB/2011 tentang Penetapan 46 lokasi Sentra Produksi Perikanan Budidaya sebagai Kawasan Minapolitan Percontohan Tahun 2012. Hal tersebut terus dipertahankan Kabupaten Sumenep dengan tetap menjadi wilayah percontohan seperti yang disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP.240/DJ-PB/2012 tentang Penetapan 87 Lokasi Sentra Produksi Perikanan Budidaya sebagai Kawasan Minapolitan Percontohan Tahun 2013.

Bahkan pada tahun kelima pun Kabupaten Sumenep tetap menjadi wilayah percontohan sehingga menjadi wilayah prioritas dalam penerapan teknologi terbaru untuk meningkatkan produksi hasil perikanan budidaya. Terpilihnya Kabupaten Sumenep sebagai daerah percontohan menandakan bahwa ada kemajuan atau perkembangan terkait program minapolitan. Keberhasilan tersebut seharusnya dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi sebagai wujud keberhasilan daerah percontohan.

Tabel.3

Produksi dan Nilai Produksi Budidaya Rumput Laut

No.	Keterangan	2017	2018	2019
1.	Produksi Basah/ Ton	66.278,941	146.319,50	140.358,01
2.	Nilai Produksi/Rp. 000	265.115.764,00	438.958.500,00	701.790.040,00

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep Tahun 2019

Tercapainya Tujuan

Akmal dalam Priansa (2015 : 11) menjelaskan bahwa efektivitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya (*doing the*

right things) atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil. Penyelarasan antara tujuan dan output yang dihasilkan baik antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hal yang paling mendasar dalam mewujudkan keberhasilan

program itu sendiri. Minapolitan sendiri merupakan upaya pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat pesisir. Pengembangan Kawasan minapolitan adalah langkah yang diambil pemerintah dalam menciptakan *blue economy* dengan tujuan dapat mengangkat perekonomian daerah Kawasan pesisir.

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu penghasil komoditas rumput laut terbesar di Jawa Timur. Budidaya rumput laut yang bertempat di Kecamatan Saronggi telah berlangsung cukup lama dari tahun ke tahun, dengan adanya pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Saronggi potensi rumput laut dapat dikembangkan menjadi olahan yang mempunyai nilai jual yang tinggi, sehingga dapat berdampak terhadap pendapatan masyarakat pesisir.¹²

Menurut Makmur (2015:7-8), organisasi apapun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, sehingga tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang. Tujuan yang diharapkan dapat dikatakan berhasil karena dilihat dari hasil produksi dan nilai produksi budidaya rumput laut di Kecamatan Saronggi meningkat signifikan dari tahun 2017 sampai 2018. Pada tahun 2017, produksi basah sebanyak 66.278,941 ton dan nilai produksinya sebesar Rp. 265.115.764,00. Pada tahun 2018, produksi basah sebanyak 146.319,50 ton dan nilai produksinya sebesar Rp. 438.958.500,00. Pada tahun 2019, produksi basah sebanyak 140.358,01 ton dan nilai produksinya sebesar Rp. 701.790.040,00.

Perubahan Nyata

Setiap program yang dikeluarkan oleh pemerintah baik yang berupa suatu kebijakan seperti pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sumenep khususnya Kecamatan Saronggi diharapkan dapat memberikan

perubahan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan daerah atau kawasan sebagai tempat implementasi kebijakan. Perubahan tersebut tentunya adalah perubahan yang positif untuk pengembangan daerah .

Perubahan nyata harus dirasakan oleh masyarakat dan harus terwujud sebagai bentuk keberhasilan program tersebut. Perubahan dapat dilihat dari inovasi program dan manfaat terhadap masyarakat. Program minapolitan di Kecamatan Saronggi memiliki banyak sub program yang dijalankan seperti program pengadaan bibit unggul, pengembangan demfarm metode longline dan metode rakit. Namun selain itu untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat maka program yang dilakukan langsung pada sasaran utama yaitu masyarakat dengan mensosialisasikan cara pengolahan rumput laut, membentuk Pokmas-pokmas untuk mengawasi secara langsung jalannya perekonomian dan pada saat itu juga kami mengadakan program pengembangan wirausahawan muda dalam usaha penumbuhan pembibitan rumput laut.

Program minapolitan sendiri telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kecamatan Saronggi. Banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya bantuan berupa bibit unggul sehingga pendapatan masyarakat menjadi lebih meningkat karena faktor bibit unggul yang dapat meningkatkan produksi sekaligus pelatihan yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan kawasan minapolitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Saronggi dapat dikatakan efektif sebab tujuan yang diharapkan berjalan sesuai rencana. Berikut ini penjelasan lebih rinci berdasarkan fokus penelitian; *pertama*, Para anggota Pokdakan sudah paham akan tujuan program tersebut sehingga bisa dikatakan Dinas

Perikanan mampu membuat para Pokdakan memahami apa yang harus mereka lakukan agar produksi mereka dapat terus meningkat sesuai sasaran meskipun masih ada beberapa Pokdakan yang belum mengikuti Standar Operasional dengan alasan terlalu rumit. *Kedua*, Keadaan ekonomi penerima program minapolitan ikut terbantu meskipun tidak terlalu signifikan. Hal tersebut sesuai dengan sasaran utama yang menjadi tujuan Dinas Perikanan Kabupaten yaitu peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sehingga program minapolitan dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat maupun pemerintah. *Ketiga*, Pelaksanaan program dalam setahun dapat diselesaikan meskipun mulai dari tahun 2016, kewenangan di bidang kelautan yang diambil oleh pemerintah provinsi menjadi hambatan serius bagi Dinas Perikanan. *Keempat*, Tujuan yang diharapkan dapat dikatakan berhasil karena dilihat dari hasil produksi dan nilai produksi budidaya rumput laut di Kecamatan Saronggi meningkat dari tahun 2017 sampai 2019. Selain itu Program Minapolitan di Kabupaten Sumenep menjadi wilayah percontohan selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2011.

Saran

- a. Sebaiknya Standar Operasional yang ada dibuat lebih sederhana menyesuaikan dengan keadaan daerah program agar para anggota Pokdakan dan pembudidaya lebih mudah memahaminya lagi.
- b. Sarana dan prasarana yang diberikan untuk pembudidaya sebaiknya lebih ditingkatkan kembali sehingga hasil produksinya juga dapat ikut meningkat.
- c. Karena mulai tahun 2016 program minapolitan diambil alih pemerintah pusat, alangkah lebih baiknya program tersebut dikembalikan lagi ke pemerintah daerah yang bersangkutan agar memiliki kewenangan mengelola daerah pesisir dengan lebih efektif.
- d. Diharapkan di tahun-tahun berikutnya program minapolitan terus berjalan dan terus

berkembang agar masyarakat Kabupaten Sumenep ekonominya dapat terangkat.

REFERENSI

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2015. *Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT Refika Aditama, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan
- Priansa, Donni Juni dan Agus Grindra. 2015. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: ALFABETA
- Rustiadi, Ernan, dkk, 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Ed. Andrea Emma Pravitasari, Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor
- Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2013. *Pengembangan Kawasan Minapolitan*
- Siagian, P Sondang . 2014. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutrisno, Edy. 2016. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Cetak ke Enam. Jakarta: Pranada Media Group.
- Dokumen dalam Website**
- KKP. (2016). *Laporan Kinerja*. Diakses dari <http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/LKJ-KKP-2016-Revisi-18-Mei-2017-1.pdf>
- BAPPENAS. (2013). *Pengembangan Kawasan Minapolitan*. Diakses dari [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143574-\[Konten\]-Konten%20D119.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143574-[Konten]-Konten%20D119.pdf)

BPS. (2018). *Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970 – 2017*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>

BAPPEDA. (2018). *RPJMD KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2021*. Diakses dari <http://bappeda.sumenepkab.go.id/publikasi/files/RPJMD/RPJMD2016-2018.pdf>

Artikel Berita dalam Website

Rukayah. (2019, Maret 25). *Kemiskinan Sumenep Naik 0.54 Persen*. Diakses dari <https://rri.co.id/daerah/653059/kemiskinan-sumenep-naik-0-54-persen>

EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN SARONGGI KABUPATEN SUMENEP

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	nanopdf.com Internet Source	2%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
3	eprints.umm.ac.id Internet Source	2%
4	Astuti Astuti, La Ode Abdul Rahman. "Peran Aplikasi Seluler terhadap Peningkatan Informasi Imunisasi Anak Bagi Orang Tua: Studi Literatur", JKEP, 2020 Publication	2%
5	docplayer.info Internet Source	1%
6	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	1%
7	repository.stie-mce.ac.id Internet Source	1%

8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
9	repository.ump.ac.id Internet Source	1 %
10	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
11	vbook.pub Internet Source	1 %
12	ejournal.upi.edu Internet Source	1 %
13	www.bi.go.id Internet Source	1 %
14	davidkaubanase.blogspot.com Internet Source	1 %
15	www.jdih.polmankab.go.id Internet Source	1 %
16	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
17	doczz.net Internet Source	<1 %
18	jurnal.umus.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %

20	Abdurrahman Rahim Thaha, Luki Natika, Iwan Henri Kusnadi. "Efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Studi Kasus di Kecamatan Blanakan)", <i>The World of Business Administration Journal</i> , 2020 Publication	<1 %
21	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
22	ejournal.unmus.ac.id Internet Source	<1 %
23	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
24	pusatliputan.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	repo.apmd.ac.id Internet Source	<1 %
26	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
27	ekbis.sindonews.com Internet Source	<1 %
28	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1 %
29	turdatv.com Internet Source	<1 %

30 www.jim.unsyiah.ac.id <1 %
Internet Source

31 www.bisnis-sumatra.com <1 %
Internet Source

32 www.coursehero.com <1 %
Internet Source

33 pt.scribd.com <1 %
Internet Source

34 sna-iaikapd.or.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On